



MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

**Menggali Konsep Matriarki
Upaya Membangun Sistem Hukum
yang Berkeadilan bagi Perempuan**
Pinky Saptandari

**Program Pelatihan Pembentukan Tim
untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia**
E.M. Agus Subekti Doelhadi

**Kekerasan Sosial dan Politik
Suatu Ancaman Teori**
Muhammad Asfar

**Perpu Tenaga Kerja dan Perlindungan TKW
dari Tindak Kekerasan**
I.B. Wirawan

**Militer dalam Konflik Bersenjata
di Kawasan Asia Tenggara**
Tri Yoga

**Kriminalitas dan Dampaknya terhadap Perekonomian
di Kota Surabaya**
H. Karjadi Mintaroem

**Regionalisation of the World Economy :
Stepping - Stones or Stumbling Block ?**
Sartika Soesilowati

**Kejahatan dalam Dunia Kedokteran
Contoh Kasus Mal Praktek**
Bambang Subagio

**Resensi Buku
Anthony Giddens : Suatu Pengantar**
Karnaji

MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

Diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, sebagai terbitan berkala tiga bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif.

Pemimpin Umum

Hotman M. Siahaan

Wakil Pemimpin Umum

I. Basis Susilo

Penanggungjawab

Kris Nugroho

Dewan Redaksi

Soetandyo Wignjosebroto (Unair)

Ramlan Surbakti (Unair)

Daniel Theodore Sparringa (Unair)

Mohtar Mas'ood (UGM)

Ashadi Siregar (UGM)

Herudjati Purwoko (Undip)

Edy Suhardono (Ubaya)

Pemimpin Redaksi

Doddy S. Singgih

Sekretaris Redaksi

Harijono

Redaksi Pelaksana

Bagong Suyanto

Yuyun Wahyu Izzati

Helmy Prasetyo

Produksi dan Pemasaran

Herwanto

STT No. 841/SK/Ditjen PPG/STT/1981

ISSN 0216-2407

Alamat Redaksi: FISIP Unair Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia

Telepon: 031-5034015, Fax: 031-5022492

e-mail: mkp@sby.centrin.net.id

PENGANTAR REDAKSI

Tema *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* edisi kali ini terfokus pada persoalan kekerasan dan tindak kejahatan di perkotaan. Sengaja tema ini dipilih, karena sebagai sebuah realitas sosial, perkembangan berbagai aksi kekerasan dan tindak kejahatan belakangan ini bukan saja makin mencemaskan, tetapi juga makin tak terbendung. Gejala kekerasan (*violence*), kebiadaban (*barbarity*), kekejaman (*cruelty*) dan segala bentuk tindakan yang melampaui batas kemanusiaan (*inhumanity*) yang muncul dalam kehidupan umat manusia tak ubahnya seperti sebuah kutukan: ia hadir begitu saja tanpa permisi dan sepertinya tidak mudah untuk ditanggulangi dalam waktu cepat.

Dari berbagai tulisan yang masuk ke meja redaksi, beberapa memiliki topik sama dengan tema edisi ini antara lain tentang Kekerasan Sosial dan Politik: Suatu Ancangan Teori yang ditulis oleh Muhammad Asfar, Perpu Tenaga Kerja dan Perlindungan TKW dari Tindak Kekerasan oleh I.B. Wirawan, Militer dalam Konflik Bersenjata di Kawasan Asia Tenggara dari Tri Yoga, Kriminalitas dan Dampaknya terhadap Perekonomian di Kota Surabaya ditulis H. Karjadi Mintaroem, serta Kejahatan dalam Dunia Kedokteran: Contoh Kasus Mal Praktek oleh Bambang Subagjo. Selain mengetengahkan permasalahan kejahatan dan kekerasan di Perkotaan, redaksi juga menghadirkan tulisan tentang konsep matriarki berlandaskan sistem hukum yang berkeadilan bagi perempuan oleh Pinky Saptandari, E.M. Agus Subekti Doelhadi tentang Program Pelatihan Pembentukan Tim untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia, dari ekonomi Regionalisation of the World Economy: Stepping-Stones or Stumbling Block? oleh Sartika Soesilowati serta Resensi Buku dari Karnaji mengenai Anthony Giddens: Suatu Pengantar.

Terlepas teori dan pendekatan manakah yang lebih mampu menjelaskan realitas kekerasan di masyarakat saat ini, yang jelas di Indonesia sejak situasi krisis ekonomi, suasana euforia mulai merambah sendi-sendi kehidupan masyarakat, konflik mulai meletup di berbagai wilayah, tindakan kekerasan yang berkembang di masyarakat kian lama justru kian populer. Kekerasan, apakah itu yang berdimensi politik, sosial maupun berdimensi budaya seolah begitu mudah mencuat tanpa bisa dibendung sedikit pun oleh sistem integrasi yang ada.

Diakui atau tidak, di masyarakat kita saat ini yang terjadi adalah gejala sofistikasi kekerasan. Artinya cara-cara melakukan kekerasan makin hari cenderung makin sadis dari yang paling sederhana melukai, menganiaya sampai membunuh dengan cara-cara yang sudah berada di luar batas kemanusiaan.

Harapan kami, semoga edisi kali ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pembaca yang budiman.

Tim Redaksi

Topik Utama Edisi No. 4 (Oktober) 2003:
Pertanahan dan Pembangunan

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

iii

Daftar Isi

v

Menggali Konsep Matriarki

Upaya Membangun Sistem Hukum yang Berkeadilan bagi Perempuan

Pinky Saptandari

1

Program Pelatihan Pembentukan Tim untuk Pengembangan

Sumber Daya Manusia

E.M. Agus Subekti Doelhadhi

11

Kekerasan Sosial Dan Politik : Suatu Ancaman Teori

Muhammad Asfar

29

Perpu Tenaga Kerja dan Perlindungan TKW dari Tindak Kekerasan

I.B. Wirawan

41

Militer Dalam Konflik Bersenjata di Kawasan Asia Tenggara

Tri Yoga

53

Kriminalitas dan Dampaknya terhadap Perekonomian di Kota Surabaya

H. Karjadi Mintaroem

67

Regionalisation of the World Economy :

Stepping - Stones or Stumbling Block ?

Sartika Soesilowati

75

Kejahatan dalam Dunia Kedokteran : Contoh Kasus Mal Praktek

Bambang Subagjo

89

Resensi Buku

Anthony Giddens : Suatu Pengantar

Karnaji

93

KEKERASAN SOSIAL DAN POLITIK Suatu Ancangan Teori

Muhammad Asfar

Dosen Program Studi Ilmu Politik Unair

Abstract

Since the 27th July, 1996 riots, several mass riots with physical violence happened throughout the country. As recorded, social and political violence was fluctuated. Its intensity was increased before and during Soeharto's step down, 1997 general elections, polling in East Timor, 1999 general elections as well as before and during the changing of Abdurrahman Wahid's administration. History witnessed, social and political violence in the last eight years was extremely huge in quantity, intensity and in the number of victims. Latest studies on social and political conflicts with physical violence usually being understood within the context of transitional theories and democracy consolidation. The lattest seems to be the most possible theoretical framework to describe social and political violence phenomena in Indonesia.

Keyword: *social and political violence*

Pertanyaan teoritis maupun praktis yang perlu diajukan adalah, apakah kekerasan sosial dan politik itu merupakan keharusan historis, sebagai suatu tahapan yang harus dilalui, atau produk dari sebuah demokrasi? Apapun jawaban atas pertanyaan ini — tentu saja — mengantarkan pada pertanyaan lanjutan yang lebih substansial: Apakah harga sebuah demokrasi sepadan dengan tumbangnyaratusan, bahkan ribuan nyawarakyat sipil yang tidak berdosa; termasuk perempuan-perempuan korban perkosaan yang menjadi tumbal pergantian sebuah rejim otoritarian satu ke rejim otoritarian lainnya? Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya bukan hanya berangkat dari fenomena khas Indonesia, tetapi sudah

menjadi gejala global. Di dalam era di mana demokrasi telah tumbuh dengan subur, mengapa kekerasan politik baik yang dilakukan oleh negara maupun kelompok-kelompok masyarakat justru berlomba mengikutinya? Di dalam era dimana aktivitas ekonomi tumbuh dengan baik mengapa terjadi disparitas pertumbuhan kesejahteraan yang justru memunculkan aktivitas kekerasan? Dalam sebuah bukunya, *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict*, Jack Snyder menyimpulkan proposisi yang agak sulit dipercaya, bahwa *as more people begin to play a larger role in politics, ethnic conflict within a country becomes more likely* (Snyder, 2000:27).

Ini mungkin sebuah paradoks demokrasi. Sebuah sistem yang diimpikan hampir semua penghuni planet bumi, namun membutuhkan pengorbanan yang cukup besar untuk merealisasikan kredo-kredonya. Kekerasan justru terjadi pada suatu era di mana pertumbuhan ekonomi dan demokrasi yang tidak pernah terjadi bahkan terbayangkan sebelumnya. Kredo di kalangan *developmentalist* bahwa *the growth of democratic regime and economic prosperity would lead to civil peace* ternyata hanya tinggal harapan. Baik di negara maju maupun — lebih-lebih — di negara berkembang, kekerasan sosial dan politik menjadi fenomena umum terutama sejak memasuki milenia baru ini. Banyak pemerintahan *fragile* seperti di beberapa negara Afrika, Asia dan Eropa posisinya sangat lemah karena dihadapkan pada perang sipil yang tidak kunjung selesai, sementara dibanyak pemerintahan stabil juga masih dihadapkan pada banyaknya persoalan brutalitas terhadap kelompok-kelompok minoritas seperti kaum miskin, ras, agama, etnis, seksualitas, dan sebagainya. Pendek kata, seperti yang ditulis oleh Mark Ungar dkk, *in every region, rapid economic change and reform has been associated with rising levels of violence* (Ungar, Bermanzohn, and Worcester, 2002:1).

Setidaknya ada enam fenomena kekerasan politik yang belakangan ini telah menjadi fenomena global dan menyertai fenomena pertumbuhan demokrasi, yakni: *pertama*, fenomena kekerasan politik yang dilakukan oleh — atau melibatkan aparat — negara, yang sering dikenal dengan politik kekerasan (*politics of violence*). Banyak kekerasan politik terjadi justru melibatkan kewenangan atau aparat negara. Contoh kasus di masa lalu yang

patut diangkat adalah terjadinya hukuman mati tanpa melalui proses pengadilan yang *fair* di Amerika Serikat. Setidaknya sampai 1968, tidak kurang dari 4.742 pembunuhan semacam ini, 73 persen diantaranya korbannya kulit hitam. Kasus ini terjadi, menurut catatan Bermanzohn, karena melibatkan kewenangan negara (Bermanzohn, 2002:148). Fenomena politik kekerasan negara tampak pada saat terjadinya perang. Di masa lalu, perang antara negara selalu melibatkan banyak korban perempuan yang diperkosa. Dalam dekade belakangan ini, korban perkosaan seringkali ditemukan ketika terjadi perang sipil atau proses transisi demokrasi yang melibatkan kekerasan fisik. Kasus perang sipil di Yugoslavia, Pakistan, Rwanda, termasuk di Indonesia ketika terjadi penggulingan rejim Soeharto, adalah contoh-contoh kecil diantaranya. Hal ini bisa terjadi karena negara membiarkan terjadinya perkosaan sebagai kebijakan untuk — meminjam istilah Sharlach — to maintain social and political inequality. Menurutnya, suatu negara yang didominasi oleh satu gender atau satu kelompok etnis (atau koalisi etnik) akan mendorong laki-laki dari kelompok etnis yang dominan untuk melakukan perkosaan terhadap perempuan dari kelompok etnis yang lain untuk menjaga agar kelompok subordinasi tetap tersubordinasi (Sarlach, 2002:107).

Bentuk lain dari politik kekerasan yang dilakukan oleh negara adalah aksi teror, penyiksaan, penculikan aktivis, pembungkaman kaum oposisi, pelenyapan nyawa manusia, dan sebagainya, termasuk apa yang oleh pengamat disebut dengan *state terrorism*. Fenomena inilah yang ditunjuk oleh Mark Ungar, bahwa transisi demokrasi dan gelombang

demokrasi global sejak dekade 1980-an ternyata masih meninggalkan praktik-praktik politik non demokratis. Salah satu bentuknya adalah masih banyaknya — atau munculnya kembali — praktik-praktik *state violence* seperti penculikan, penyiksaan, dan pemenjaraan kepada *political troublemakers* (Ungar, 2002:48-89).

Kedua, fenomena kekerasan politik yang menyertai proses transisi atau konsolidasi demokrasi. Lebih dari satu dekade terakhir, kekerasan politik dibanyak negara seringkali sangat mudah diasosiasikan dengan transisi rejim. Variabel mayor penjelasnya biasanya dapat dikaitkan dengan telah jatuhnya rejim otoritarian di negara-negara yang mengalami transisi demokrasi ini namun proses konsolidasi tak kunjung selesai. Kekerasan terjadi karena berbagai aturan lama telah roboh sementara aturan-aturan baru belum juga muncul, kalau toh telah ada belum menjadi komitmen bersama semua komponen masyarakat. Proses demokrasi yang terjadi masih bersifat formal, dalam tataran teoritis masih dipahami sebagai proses liberalisasi. Pelaksanaan pemilu pasca tumbanganya rejim lama seringkali juga bukan jawaban atas segala persoalan politik yang muncul, karena pemilu itu sendiri tidak jarang sebagai pemicu dan "ladang" pertarungan konflik sosial politik yang melibatkan kekerasan. Dalam konteks transisi demokrasi di negara-negara Timur Tengah, yang oleh Smitter dilabel dengan gelombang demokrasi keempat, kekerasan politik tidak jarang melibatkan gerakan "Islam Politik", apakah disebabkan oleh pertarungan kelompok yang bermaksud untuk memasukkan nilai-nilai demokrasi ke rejim Islam atau yang mempertahankannya,

atau gerakan-gerakan "Islam politik" seperti pejuang Palestina atau Afganistan (Ghadbian, 2002:90-106).

Proses transisi demokrasi seringkali juga diikuti dengan munculnya gerakan-gerakan etnonasional yang menginginkan pemisahan wilayah, yang hampir semua gerakan ini melibatkan kekerasan politik. Berbagai konflik etnonasional yang melibatkan semangat pemisahan wilayah atau gerakan-gerakan separatisme biasanya diselesaikan melalui kekerasan dan perang. Dari 110 konflik etnonasional yang tercatat selama periode 1989-1999 misalnya, hanya 20% yang berakhir atau hasilnya berupa kesepakatan atau perjanjian damai (MacGinty, 2002:172). Repotnya, dalam berbagai kasus di atas, hampir semuanya melibatkan kewenangan negara. Tampaknya, melihat dari eskalasi dampak yang ditimbulkannya, perlu ada penafsiran ulang terhadap pemahaman yang dianut oleh hampir semua negara modern sekarang ini, seperti halnya yang telah dibenarkan oleh Max Weber ratusan tahun silam, bahwa negara memiliki klaim eksklusif atas legitimasi penggunaan kekuatan fisik (senjata). Mungkin perlu ada pembatasan penggunaan kekuasaan fisik itu secara ketat, sehingga tidak menimbulkan korban sipil dan proses perjuangan *self determination* bisa dilakukan melalui cara-cara dialog dan damai.

Ketiga, fenomena kekerasan politik yang masih menjamur di banyak negara maju secara ekonomi dan di banyak negara yang sistem demokratisinya sudah stabil (*consolidated democratic regimes*). Banyaknya kejahatan rasisme dan penggunaan senjata api di Amerika Serikat misalnya, menunjukkan suatu paradoks tersendiri: bahwa negara yang maju

secara ekonomi dan stabil demokrasinya tidak secara otomatis menjamin terciptanya kedamaian kaum sipil. Laporan Amnesty International pada tahun 1998 menunjukkan, bahwa masih tetap permanen dan meluasnya pelanggaran Hak Azasi Manusia di Amerika Serikat, khususnya pelanggaran HAM pada kelompok minoritas, imigran, dan semacamnya (lihat Mason, 2002:127-145). Mungkin benar apa yang disimpulkan oleh John Keane, bahwa kekerasan memang tidak berkaitan dengan tingkat kemajuan ekonomi dan demokrasi. Di beberapa negara yang tingkat ekonomi dan demokrasinya belum maju, seperti Costa Rica dan Botswana, justru menunjukkan tingkat kekerasan politik yang sangat rendah. Dengan kata lain, mungkin perlu hati-hati untuk mengikuti kesimpulan Max Singer dan Aaron Wildavsky, bahwa *a zone of turmoil that envelops the developing world and a 'zone of peace that neatly enfolds the postindustrial west*.

Keempat, fenomena kekerasan politik justru terjadi di suatu era di mana telah terjadi restrukturisasi ekonomi secara masif dan saling ketergantungan global. Suatu paradoks memang, bahwa transformasi dari feodalisme ke industrialisasi malah membawa gerbong yang berisi meluasnya kekerasan sosial dan politik. Ketidaksamaan akses terhadap pelayanan, kontrol atas aset-aset ekonomi, dan kebijakan yang menyebabkan ketergantungan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dapat memperburuk hubungan diantara kelompok-kelompok tersebut. Ketika terjadi transformasi politik, hubungan yang buruk antar kelompok ini akan mendorong munculnya konflik sosial dan politik dengan

menggunakan kekerasan fisik. Di beberapa negara, hubungan ekonomi semacam ini seakan menjadi minyak yang membakar terjadinya perang sipil, sebagaimana yang terjadi di Irlandia, Yugoslavia, dan kekerasan yang dilakukan gerakan bersenjata di Peru dan Burma, atau kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok aksi protes jalanan seperti di Guyana dan Fiji. Pendek kata, di banyak negara, kebijakan ekonomi seperti privatisasi, pemutusan pelayanan kesejahteraan, dan semacamnya seringkali menjadi *trigger* munculnya kekerasan politik diantara kelas sosial ekonomi di dalam masyarakat (Maya, Lander and Ungar, 2002:184-208).

Kelima, fenomena banyaknya "sipil bersenjata" dan tentara sipil (*private armies*). Dalam satu dekade, peran masyarakat dan kelompok-kelompok kemasyarakatan dalam menggerakkan berbagai aksi sosial dan politik di banyak negara meningkat secara tajam. Pada satu aspek, kekerasan telah menjadi suatu karakteristik instrinsik dari hubungan antar kelompok. Kekerasan bisa jadi disebabkan oleh kekuasaan atau kebijakan negara atau sebagai reaksi terhadapnya. Perang sipil di Columbia adalah salah satu bukti dari dahsyatnya kekerasan non negara. Munculnya tentara sipil, tentara bayaran, kelompok sipil bersenjata, dan sebagainya merupakan fenomena kekerasan global belakangan ini. Repotnya, kekerasan *nonstate* ini malah sangat sulit dikontrol. Sebab, menurut Shanon, mereka bukanlah tentara sungguhan yang memilih etika dan profesionalisme militer: *armed formations...without the disciplinary backbone of professional armies* (Shannon, 2002:44-5).

Dan *keenam*, masih banyaknya

kekerasan politik yang menghubungkan antara masyarakat dan negara. Di berbagai belahan dunia, semakin banyak komponen-komponen merespon kebijakan negara melalui berbagai aksi yang melibatkan kekerasan fisik, mulai dari aksi-aksi protes yang terjadi secara spontan sampai gerakan-gerakan yang melibatkan kekuatan bersenjata (*armed rebellions*). Dalam konteks Indonesia, munculnya aksi-aksi jalanan sebagai bentuk ekspresi penyampaian pendapat yang melibatkan kekerasan fisik, termasuk semakin meluasnya Gerakan Aceh Merdeka, adalah sedikit diantara contoh kekerasan politik yang melibatkan hubungan antara masyarakat dan negara. Untuk itu, para teoritis sosial dan politik mempunyai pekerjaan rumah tambahan untuk merumuskan penjelasan teoritis kasus-kasus ini sebagai bagian dari proses transisi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Agen atau Struktur?

Teori-teori sosial — baik yang klasik maupun modern — pada dasarnya hendak menjawab apakah suatu tindakan, termasuk di dalamnya aksi kekerasan kolektif itu ditentukan oleh individu secara otonom atau ditentukan oleh struktur yang melingkupinya, baik struktur dalam pengertian nilai, budaya, ekonomi maupun politik. Teori yang lebih condong pada penjelasan pertama seperti interaksionisme simbolis, etnometodologi, fenomenologi dan semacamnya masuk dalam kelompok teori-teori sosiologi mikro; sementara teori yang lebih condong pada penjelasan kedua seperti institusionalisme, fungsionalisme struktural, strukturalisme dan semacamnya masuk dalam kelompok

teori-teori sosiologi makro (Crab, 1985; Turner, 1978).

Dalam kaitannya dengan kekerasan politik kolektif, perdebatan yang muncul biasanya berkaitan dengan apakah kekerasan politik itu dilihat sebagai sesuatu yang bersifat *inherent/enherency* atau *contingent/contingency*. Sesuatu disebut *inherent* apabila ia akan selalu terjadi sehingga aktualitas potensi itu hanya dapat dihalangi, namun tidak dapat dihilangkan. Dalam kerangka inherensi kekerasan politik dianggap sebagai suatu fenomena yang normal, sebagai salah satu alternatif untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan tercapainya kepentingan politik. Oleh karena itu, pertanyaan yang bisa diajukan oleh para pendukung teori kontingensi adalah *why not?*: mengapa konflik atau kekerasan politik tidak muncul sesering yang seharusnya. Kekerasan atau perilaku agresif lainnya secara biologis dianggap sebagai sesuatu yang inheren pada diri manusia, sebagaimana juga terdapat pada hewan/binatang yang lain (Lorenz, 1996).

Sebaliknya, sesuatu dianggap *contingent* apabila ia tergantung pada tersedianya kondisi-kondisi tidak lazim (*unusual conditions*) yang terjadi secara acak, yaitu kondisi-kondisi yang mengandung banyak unsur kebetulan. Kontingensi adalah sesuatu yang tidak biasa atau tidak rutin sehingga memerlukan penjelasan. Meskipun begitu, kontingensi bukan berarti indeterminasi (*indeterminacy*). Sebab, kondisi-kondisi umum seperti kenaikan atau penurunan misalnya, memungkinkan terjadinya suatu kekerasan politik. Dengan begitu, kontingensi bukanlah sesuatu yang bersifat acak (*random*) atau suatu peristiwa (kekerasan politik) yang selalu tidak dapat

dikontrol keberadaannya (Eckstein, 1980:138-40). Jika cara pandang inherensi dan kontingensi dikontraskan, maka akan tergambar sebagaimana yang terlihat dalam tabel 1 berikut (Asfar, 1998)

sering kali bercampur dan sulit dipisahkan. Oleh karena itu, bagi Eckstein, persoalannya bukanlah apakah sesuatu (kekerasan politik) itu inherensi atau kontingensi, tetapi apakah suatu subyek itu

Tabel 1
Kontras antara Inherensi dan Kontingensi

Inherensi	Kontingensi
1. Sifat dasar manusia dalam kehidupan politik adalah memaksimalkan pengaruh dan kekuasaan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Berbagai cara ditempuh untuk mencapai tujuan ini, termasuk melalui kekerasan politik. 2. Karena kekerasan dianggap normal, persoalan teori in-herensi adalah mengapa kekerasan politik tidak terjadi sesering yang semestinya. 3. Pilihan menggunakan kekerasan atau tidak adalah persoalan taktik, yang menyangkut perhitungan untung rugi. Artinya, para pelaku kerusuhan adalah aktor rasional. 4. Kekerasan politik dipilih secara intrinsik, yaitu berdasarkan motivasi, kalkulasi, dan keinginan yang ada dalam diri aktor atau para pelaku. 5. Faktor-faktor obyektif, seperti perimbangan kekuatan pemaksa atau kondisi-kondisi yang memudahkan keberhasilan penggunaan kekerasan merupakan faktor penjas utama terjadinya kerusuhan massa.	1. Sifat dasar manusia dalam kehidupan politik adalah ke arah perdamaian, resolusi atau menghindari konflik yang menggunakan kekerasan politik dianggap sebagai cara-cara kompetisi yang tidak normal. 2. Persoalan mendasar dari teori kontingensi adalah mengapa kekerasan politik terjadi dan bagaimana men-jelaskan frekuensinya. 3. Pilihan penggunaan kekerasan politik sangat bersifat afektif, tidak berdasarkan kalkulasi untung rugi. Artinya, para pelaku kerusuhan adalah aktor yang mengalami deprivasi. 4. Kekerasan politik terjadi secara ekstrinsik, yakni bersumber dari sebab-sebab yang berada di luar para pelaku, dan oleh faktor-faktor kontekstual atau kontingen. 5. Karena kekerasan politik bersifat afektif, maka per-imbangan kekuatan pemak-sa dan kondisi-kondisi yang mempermudah keberhasilan penggunaan kekerasan mempunyai daya jelas sangat kecil.

Berdasarkan tabel 1 di atas, secara sederhana dapat dikatakan bahwa inherensi melihat kekerasan politik sebagai suatu tindakan yang keberadaannya dapat dijelaskan oleh faktor-faktor yang ada dalam pelaku kekerasan, sementara kontingensi menjelaskan kekerasan politik dari faktor-faktor yang ada di luar pelaku kekerasan. Betapapun, dalam kehidupan nyata, antara inherensi dengan kontingensi

dianggap pada dasarnya inherensi atau kontingensi. Persoalannya bukanlah mana yang benar diantara keduanya, namun mana yang lebih dapat menjelaskan suatu peristiwa (kekerasan politik) secara lebih baik. Inherensi dan kontingensi bukanlah persoalan kubu-kubu filosofis yang perlu dipertentangkan satu sama lain, namun lebih sebagai persoalan pilihan strategi

penelitian (Webb, 1986: 169-74).

Cara pandang yang menempatkan kekerasan politik sebagai sesuatu yang bersifat inherensi atau kontingensi pada dasarnya sejajar dengan persoalan utama dalam perdebatan teoritis di kalangan ilmuwan sosial, yakni apakah suatu kekerasan kolektif itu diletakkan dalam tataran agen atau struktur. Dalam tataran agen, kekerasan politik dipahami sebagai suatu tindakan individu yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk memproduksi dan mentransformasikan realitas sosial. Para pelaku dipahami sebagai individu yang relatif otonom untuk melakukan tindakan, dan aksi politik kolektif dipahami sebagai produk dari pilihan rasional seseorang. Oleh karena itu, penjelasan terhadap kekerasan politik kolektif selalu dilihat dari "faktor-faktor dalam" para pelaku kekerasan dan mengabaikan faktor dan kendala struktural serta proses-proses sosial lainnya. Beberapa penjelasan teoritis yang diturunkan dari kerangka analisis agen ini diantaranya dilakukan oleh Rule ketika menjelaskan perilaku/aksi kolektif oleh Berk ketika menggunakan pendekatan permainan untuk menjelaskan kerusuhan massa (Rule, 1988: 170-99).

Sebaliknya, dalam tataran struktur, kekerasan politik dipahami sebagai hasil dari proses hubungan-hubungan sosial atau struktur dimana para pelaku tersebut berada. Nilai dan norma dipandang sebagai "imperaktif struktural" yang terinternalisasi dalam diri individu, sehingga orang berperilaku selaras dengan –atau fungsional terhadap– sistem. Oleh karena itu, penjelasan terhadap kekerasan politik kolektif selalu dilihat dari "faktor-faktor luar". Arah pelaku kekerasan dan mengabaikan faktor-faktor minat, motivasi

dan strategi. Tindakan agen (dalam bentuk kekerasan politik kolektif) dianggap tidak lebih dari artefak atau produk struktur (Sztompka, 1994: 25-34). Beberapa penjelasan teoritis yang diturunkan dari kerangka analisis struktur ini diantaranya dilakukan oleh Gurr, Skockpol, Hagopian, dan Davies (Gurr, 1970:3-58; Skockpol, 1994:99-119; Davies, 1968).

Secara ontologis, persoalan agen dan struktur pada dasarnya mempertanyakan sejauh mana tindakan-tindakan individu merupakan proses sosialisasi dan produk struktur yang hanya dapat dikontrol secara minimal; dan sejauh mana tindakan-tindakan tersebut merupakan produk pilihan rasional yang sengaja diambil oleh individu sebagai subyek yang otonom. Secara epistemologis, persoalan agen dan strktur pada dasarnya berkisar pada upaya untuk menjelaskan suatu efek peristiwa politik tertentu: sebagai konsekuensi tindakan dan niat aktor yang terlibat; atau produk dan struktur dan hubungan-hubungan sosial di mana para aktor tersebut berada (Panggabean, 1996). Jika kedua kerangka analisis di atas dikontraskan, maka akan terlihat sebagaimana yang tergambar dalam Tabel 2.

Yang menjadi persoalan, tindakan seseorang seringkali tidak dengan mudah diidentifikasi dan ditempatkan dalam tataran agen atau struktur. Penjelasan-penjelasan teoritis dalam tataran agen seringkali bersifat voluntaristik dan cenderung menempatkan individu sebagai subyek yang membentuk dan mengubah struktur, seolah-olah individu hidup dalam kevakuman sosial. Sebaliknya, penjelasan-penjelasan teoritis yang menempatkan struktur sebagai faktor penjelas umumnya terlalu deterministik dan cenderung

Tabel 2
Kontras Antara Agen dan Struktur

AGEN	STRUKTUR
1. Individu adalah agen yang tindakannya secara sadar dan sengaja memproduksi dan mentransformasi realitas sosial. 2. Penjelasan dari dalam, mengabaikan dan menyepelekan faktor dan kendala struktural dan proses-proses sosial dan politik. 3. Masalah Weber, yaitu perhatian pada individu dan aksi manusia penentu struktur sosial. 4. Realitas dipandang rapuh, dapat dirundingkan (<i>bargaining for reality</i>) dan terbentuk sebagai konstruksi individu-individu yang subyektif. 5. Hubungan yang monocausal dan sederhana mengaitkan agen dengan struktur: Agen membentuk struktur. 6. Penekanan pada praktek-praktek mikro (<i>micro-practices</i>) dalam interaksi sosial yang ditandai dengan keunikan dan kekayaan inter-aksi sosial dan politik. 7. Untuk menjelaskan suatu peristiwa dan fenomena politik dimulai dari — dan diakhiri dengan — individu. 8. Voluntarisme, yakni memahami peristiwa dan fenomena politik dengan memperhatikan niat dan motivasi aktor. 9. Penekanan pada bagian-bagian yang membentuk keseluruhan, seperti tindakan individu.	1. Masyarakat terdiri dari hubungan-hubungan sosial atau struktur yang menjadi kondisi interaksi dan hasil tindakan agen-agen. 2. Penjelasan dari luar, mengabaikan dan menyepelekan faktor-faktor motivasi, niat, strategi dan aksi agen karena dianggap tidak lebih dari artefak atau produk struktur. 3. Masalah Durkheim, yaitu perhatian pada masyarakat sebagai sistem yang berdikari, sedangkan individu dianggap sebagai emanasi, representasi, dan epifenomena masyarakat. 4. Nilai dan norma dipandang sebagai imperatif struktural yang terinternalisasi dari dalam individu, sehingga orang berperilaku selaras dengan, atau fungsional terhadap, sistem. 5. Hubungan yang monocausal dan sederhana mengaitkan struktur dengan agen: Struktur membatasi dan bahkan menentukan keagenan. 6. Penekanan pada aksi yang selalu tertanam dalam struktur yang lebih luas (<i>macro-embeddedness</i>). 7. Struktur sosial politik dianggap sebagai alpa dan omega penjelasan tindakan aktor. 8. Determinisme dan teleologisme, yakni pandangan yang menempatkan proses-proses sosial dan politik dinisbatkan kepada <i>historical end-state</i>, seperti hubungan-hubungan ekonomi dalam marxisme. 9. Penekanan pada keseluruhan yang mempengaruhi bagian-bagian yang menjadi unsurnya.

menempatkan individu hanya sebagai obyek dari struktur, seolah-olah individu seperti robot yang tidak mempunyai kehendak bebas. Disamping itu, dalam realitas empirik, antara agen dan struktur keduanya seringkali bertumpang tindih satu sama lain. Untuk itu, beberapa ilmuwan — seperti halnya yang dijadikan

sebagai kerangka pemikiran dalam tulisan ini — mencoba memadukan kedua cara pandang. Bhaskar misalnya, melihat masyarakat sebagai kondisi bagi keagenan manusia, namun pada saat yang sama ia juga merupakan produk (reproduksi) dari keagenan manusia. Struktur, di samping dianggap sebagai kendala sekaligus juga

dianggap sebagai peluang. Pendek kata, sebagaimana yang dituliskan oleh Archer, *agency leads to structural and cultural elaboration, but is itself elaborated in the process* (Archer, 1989).

Cara pandang yang sama juga dapat diikuti dari jalan pikiran Bourdieu (Bourdieu, 1994). Ia melihat banyak praktik — terutama praktik budaya — merupakan hasil hubungan antara habitus (struktur sosial yang sudah terinternalisasi) dan *field* (jaringan hubungan yang melibatkan posisi agen dan struktur). *Field* mengkondisikan habitus, sementara habitus membentuk *field* sebagai sesuatu yang bermakna. Formula sederhana yang ditawarkan Bourdieu adalah:

$$P = [(h) (c)] + f$$

Dimana,

P = praktik

H = habitus

C = capital

F = field

Dalam ilmu politik — dan ilmu sosial pada umumnya — upaya memadukan kedua cara pandang telah dilakukan secara istematis oleh Giddens, struktur tidak hanya menimbulkan kendala (*constraint*) bagi tindakan manusia, namun ia juga dapat menciptakan peluang untuk melakukan tindakan secara otonom. Ia menawarkan kerangka konseptual/teori yang diberi nama teori strukturasi. Teori strukturasi pada dasarnya mengandung empat perangkat konsep, yaitu dualisme struktural (*duality of structure*), dualisme subyek-obyek, dimensi ruang dan waktu, dan pemahaman ganda (*double hermeneutic*) (Surbakti, 1992; Giddens, 1979; 1984; 2001). Dualisme struktur pada dasarnya memandang bahwa struktur dan

individu-aktor (agen) berinteraksi dalam proses produksi dan reproduksi institusi serta hubungan-hubungan sosial. Artinya, agen merupakan hasil (*outcome*) dari struktur namun pada saat yang bersamaan agen tersebut juga menjadi mediasi bagi pembentukan struktur baru. Individu atau agen tidak hanya sekedar menjadi penanggung beban — dan selalu menyesuaikan dengan — struktur, namun juga memiliki pengetahuan mengenai realitas dan berdasarkan pemahaman itu ia bertindak untuk mengubah realitas sekelilingnya. Ia mencatat: *the structural properties of social system are both the medium and the outcome of the practices that constitute those systems* (Giddens, 1984:69).

Perangkat konsep kedua adalah dualisme subyek-obyek. Dualisme subyek-obyek ini pada dasarnya menyangkut orientasi agen atau individu-aktor terhadap struktur, yang dapat dibedakan menjadi tiga. *Pertama*, orientasi rutin praktis, yaitu para aktor yang secara psikologis hanya mencari rasa aman. Mereka ini hanya berperan sebagai medium untuk mereproduksi struktur belaka, sama sekali tidak ada upaya untuk mempersoalkan — apalagi mengubah — struktur yang telah ada. *Kedua*, orientasi teoritik, yaitu para aktor yang memiliki kemampuan memelihara jarak dengan struktur sehingga ia memiliki pemahaman yang jelas terhadap struktur dan mampu merespon apa yang diciptakan struktur kepadanya. *Ketiga*, orientasi strategik pemantauan, yakni para aktor yang tidak hanya mampu menjaga jarak tetapi juga berkepentingan terhadap apa yang dilahirkan struktur, sehingga mereka dapat menanggapi struktur. Hanya pada kelompok kedua dan ketiga yang

cenderung melahirkan dualisme subyek-obyek. Perangkat konsep ketiga adalah dimensi ruang dan waktu. Artinya, setiap institusi dan hubungan-hubungan sosial berlangsung dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Interaksi sosial tidak hanya berlangsung di dalam — dan dibentuk oleh — ruang dan waktu sebagai lingkungan eksternal, akan tetapi pada gilirannya ruang dan waktu tersebut juga menjadi internal bagi hubungan-hubungan sosial karena telah memberi makna sosial bagi interaksi tersebut.

Perangkat konsep keempat pada dasarnya menyangkut tentang metode untuk mengungkap interaksi antara struktur dan agen dalam dimensi ruang dan waktu, yaitu metode pemahaman ganda. Yakni, pemahaman ilmuwan tentang realitas (*the second order understanding*) dan realitas yang dipahami oleh awam (*the first order understanding*). Jika aliran positivisme memandang kalangan awam sebagai obyek pengetahuan, teori ini menganggap awam sebagai obyek dan

subyek sekaligus. Kalangan awam dipandang memiliki kemampuan untuk memahami realitas sekelilingnya sekaligus mampu menggunakan pemahaman tersebut untuk bertindak.

Penutup

Kerangka teori di atas, tentu saja, baru sebagian kecil dari penjelasan teoritis yang lazim dipakai untuk menjelaskan fenomena kekerasan politik. Disamping teori-teori di atas, tentu masih banyak penjelasan teoritis yang bisa dipakai untuk menjelaskan fenomena kekerasan sosial dan politik. Studi-studi terbaru tentang konflik sosial dan politik yang melibatkan kekerasan fisik seringkali dipahami dalam konteks teori-teori transisi dan konsolidasi demokrasi. Teori-teori terakhir ini, tampaknya, bisa dipakai sebagai kerangka teori tambahan untuk menjelaskan fenomena kekerasan sosial dan politik yang belakangan ini melanda Indonesia.

Daftar Pustaka

- Aribowo et al., *Kekerasan Politik Pemilu 1999*, (Surabaya: Hipotesis, 1998)
- Asfar, Muhammad, "Kekerasan Politik Pemilu 1999" dalam *Prisma*, Nomor 1, Tahun 1998.
- Archer, M.S., *The Morphogenesis of Social Agency*, (Uppsala: SCASSS, 1989).
- Berk, Richard A, "A Gaming Approach to Crowd Behavior", in L.E. Genevie (eds.), *Collective Behavior and Social Movements*, (Ithaca, IL: Peacock Publishers, 1978).
- Bermanzohn, Shally A., "Violence, Nonviolence, and the U.S. Civil Rights Movement," in Kenton Worcester et al. (eds.), *Violence and Politics: Globalization's Paradox*, (New York: Routledge, 2002).
- Bourdieu, Pierre, *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*, (Cambridge: Harvard University Press, 1994).

- Crab, Ian, *Teori-teori Sosial Modern*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985).
- Davies, James C., "Toward a Theory of Revolution" in Roy C. Macridis and Bernard E. Brown (eds.), *Comparative Politics: Notes and Readings*, (Homewood: The Dorsey Press, 1968).
- Eckstein, Harry, "Theoretical Approaches to Explaining Collective Political Violence" in Ted R. Gurr (ed.), *Handbook of Political Conflict: Theory and Research*, (New York: The Free Press, 1980).
- Ghaddian, Najib, "Political Islam: Inclusion or Violence?," in Kenton Worcester et al. (eds.), *Violence and Politics: Globalization's Paradox*, (New York: Routledge, 2002).
- Giddens, Anthony, *Central Problem in Social Theory*, (London: Macmillan, 1979).
- _____, *The Constitution of Society*, (Cambridge: Polity Press, 1984).
- _____, *The Global Third Way Debate*, (Cambridge: The Polity Press, 2001).
- Gurr, Ted R., *Why Men Rebel*, (Princeton: Princeton University Press, 1970).
- Keane John, "Fear and Democracy," in Kenton Worcester et al. (eds.), *Violence and Politics: Globalization's Paradox*, (New York: Routledge, 2002).
- Lorenz, Konrad, *On Aggression*, (New York: Harcourt, Brace & World Inc., 1996).
- Mason, Carol, "From Protest to Redistribution: The Guerrilla Politics of Pro-Life Violence," in Kenton Worcester et al. (eds.), *Violence and Politics: Globalization's Paradox*, (New York: Routledge, 2002).
- Maya, Margarita L., Lander, Luis E., and Ungar, Mark, "Economics, Violence, and Protest in Venezuela: A Preview of the Global Future?," in Kenton Worcester et al. (eds.), *Violence and Politics: Globalization's Paradox*, (New York: Routledge, 2002).
- McGinty, Roger, "Ethnonational Conflicts, Democratization, and Hate Crime," in Kenton Worcester et al. (eds.), *Violence and Politics: Globalization's Paradox*, (New York: Routledge, 2002).
- Rule, James, *Theories of Civil Violence*, (Berkeley: University of California Press, 1988).
- Shannon, Ulric, "Private Armies and the Decline of the State," in Kenton Worcester et al. (eds.), *Violence and Politics: Globalization's Paradox*, (New York: Routledge, 2002).
- Sharlach, Lisa, "State Rape: Sexual Violence as Genocide," in Kenton Worcester et al. (eds.), *Violence and Politics: Globalization's Paradox*, (New York: Routledge, 2002).
- Skocpol, Theda, *Social Revolution the Modern World*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1994).
- Snyder, Jack, *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict*, (New York: Norton, 2000).
- Sztompka, Piotr, "Evolving Focus on Human Agency in Contemporary Social Theory," in Piotr Sztompka (eds.), *Agency and Structure: Reorienting Social Theory*, (Switzerland: Gordon and Breach, 1994).
- Turner, Jonathan H., *The Structure of Sociological Theory*, (Homewood, Illinois:

The Dorsey Press, 1978).

Ungar, Mark, "State Violence and LGBT Rights," in Kenton Worcester et al. (eds.), *Violence and Politics: Globalization's Paradox*, (New York: Routledge, 2002).

Ungar, Mark, Bermanzohn, Shally A., and Worcester, Kenton. 2002. "Violence and Politics," in Kenton Worcester et al. (eds.), *Violence and Politics: Globalization's Paradox*, (New York: Routledge, 2002).

Webb, Keith, "Conflict: Inherent and Contingent Theories" in *World Encyclopedia of Peace*, volume 1, (Oxford: Pegamon, 1986).